

Inklusivitas Bantuan Sosial Lanjut Usia di Negara Berpendapatan Menengah Atas: Studi pada Afrika Selatan, Brazil, China, dan Indonesia

Kamilah Dwi Kurniawati¹

Abstrak

Kebijakan bantuan sosial lanjut usia masih terkendala rendahnya cakupan penerima bantuan dan terhambatnya akses bantuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui inklusivitas bantuan sosial lansia dengan menggunakan pendekatan *systematic review*. Inklusivitas dimaknai sejauhmana kebijakan mampu menjangkau masyarakat, dampak yang ditimbulkan dan integrasi dengan program pengentasan kemiskinan. Empat negara dikaji dalam tulisan ini yaitu Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia karena kesamaan kebijakan bantuan sosial lansia dan termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas. Data bersumber dari 25 literatur yang membahas inklusivitas bantuan sosial lansia, yang dipilih dari *Google Scholar* sebanyak 14 literatur dan 11 literatur lainnya berasal dari *Scopus*. Kata kunci yang digunakan dalam memilih literatur adalah "inclusive", "social assistance", dan "old-age". Temuan penelitian menunjukkan bantuan sosial lansia pada empat negara belum sepenuhnya inklusif. Pemaknaan lansia harus lebih diperluas dan bantuan disesuaikan dengan karakteristik lansia. Saran untuk pemerintah adalah mengelola kebijakan yang tepat; sedangkan untuk penelitian selanjutnya penting dilakukan studi tentang aspek-aspek jaminan sosial yang lain.

Kata Kunci: *Inklusivitas, Bantuan Sosial, Lansia, Negara Berpendapatan Menengah Atas, Systematic Review*

Abstract

Social assistance policies for elderly is still constrained by low coverage of beneficiaries and hampered access to assistance. This paper aims to determine inclusiveness of social assistance for elderly using a systematic review. Inclusivity in this case means how far policies reach out community, policies's impact, and integration with poverty alleviation programs. The countries studied are South Africa, Brazil, China and Indonesia because of the policies's similarities and included in upper middle income countries. The data used are 25 pieces of literatures that discuss the inclusiveness, selected from Google Scholar (14 pieces of literatures) and Scopus (11 pieces of literatures). The keywords used were "inclusive", "social assistance", and "old-age". Research findings show that social assistance for elderly in four countries is not yet fully inclusive. Elderly's definition must be expanded and assistance adapted to elderly's characteristics. Governments have to manage policies and next researchers should conduct studies on other aspects of social security.

Keywords: *Inclusivity, Social Assistance, Elderly, Upper-Middle Income Countries, Systematic Review*

Pendahuluan

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan lansia sebagai manusia yang berusia di atas 60 tahun (UN/DESA, 2017). Kini, populasi penduduk lansia di hampir seluruh negara dunia semakin meningkat dan memunculkan tantangan dari segi aspek biologis, budaya dan sosial (Sander et al., 2015). Merujuk persoalan tersebut, *International Labour Organization* (ILO) merekomendasikan negara-negara untuk mengatur perlindungan sosial lansia yang setidaknya menjamin kebutuhan pokok dan perawatan dasar (ILO, 2014). Bantuan sosial sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dan

mendorong kontribusinya pada masyarakat lewat peningkatan kapasitas individu para generasi penerus bangsa (Johnson, 2015; Andari, 2020).

Sayangnya, lansia miskin masih sulit mengakses bantuan sosial, salah satunya bantuan sosial kesehatan, karena sarana transportasi tidak memadai (Appiah et al., 2020). Begitu pun halnya dengan lansia Afrika Selatan yang mengalami kesulitan akses perawatan kesehatan, pangan dan akomodasi (Lombard & Kruger, 2009). Perlakuan tidak menyenangkan pada lansia juga terjadi di Brazil di mana mereka dianggap rendah, tidak kompeten dalam pekerjaan dan rendahnya prioritas penanganan

¹ Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada (email korespondensi: kamilah.dwi@mail.ugm.ac.id)

kesehatan, misalnya kasus AIDS (Goldani, 2010). Kelompok lansia di China juga mengalami eksklusi secara sosial karena fisik yang semakin lemah, hilangnya pekerjaan, pengurangan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan serta diskriminasi usia (Feng, 2012). Sementara itu, lansia di Indonesia belum seluruhnya mendapatkan akses kesehatan dan kebutuhan yang layak (Priebe & Howell, 2014).

Berangkat dari permasalahan tersebut, studi ini membahas inklusivitas bantuan sosial lansia yaitu suatu kondisi dimana bantuan sosial dapat diakses oleh seluruh lansia dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ada pun tulisan ini melihat inklusivitas bantuan sosial lansia di Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia sebagai empat negara berpendapatan menengah atas (kategori ini berdasarkan data World Bank tahun 2019). Terdapat lima alasan penulis memilih empat negara tersebut, yaitu (1) keempat negara memiliki jumlah lansia cukup besar (antara 6-12% lansia dari populasi) (The World Bank, 2019) dan adanya kemiripan pola ekspansi kesejahteraan dan perbaikan ekonomi (Tillin & Duckett, 2017); (2) rasio ketergantungan lansia pada Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia cukup tinggi (The World Bank, 2019); (3) alokasi dana untuk bantuan sosial lansia dan penerima manfaat yang bervariasi (Pension Watch, 2018); (4) ketersediaan literatur yang memadai dan kredibel; serta (5) melengkapi literatur sebelumnya yang membahas inklusivitas bantuan sosial lansia.

Pokok masalah yang didiskusikan dalam studi ini yaitu sejauh mana inklusivitas bantuan sosial lansia di Afrika Selatan, Brazil, China, dan Indonesia. Kemudian, hal tersebut dikaitkan dengan ideologi kesejahteraan. Studi ini diharapkan dapat melengkapi literatur terdahulu dan digunakan sebagai salah satu kajian bagi pemangku kebijakan dalam mengembangkan peraturan yang lebih inklusif pada bantuan sosial lansia.

Kerangka Teori

Ideologi Negara Kesejahteraan

Ideologi negara kesejahteraan mempengaruhi kebijakan yang dijalankan. Hal ini dikemukakan Sapir (2005) bahwa banyak penelitian negara kesejahteraan yang merujuk pada kecenderungan sikap tertentu berdasarkan ideologi yang dianut negara tersebut. Sebelum membahas lebih jauh ada baiknya pembagian

dasar ideologi negara kesejahteraan Esping-Andersen dipahami terlebih dahulu. Esping-Andersen dalam bukunya *The Three Worlds of Welfare Capitalism* membagi tiga rezim negara yaitu, liberal, konservatif dan sosial demokrat. Selain itu dia juga menyebutkan variasi negara kesejahteraan menjadi residualist, universalist dan institutionalist (Esping-Andersen, 1990).

Merujuk pembagian tersebut, Esping-Andersen mendapat kritik dari tulisannya karena (1) penjelasan demodifikasi yang tidak memerhatikan aspek gender, (2) ketidaksetaraan peran perempuan dalam keluarga dan (3) kurangnya pertimbangan gender dalam menjelaskan stratifikasi sosial (Bambra, 2007). Selain itu, kategorisasi Esping-Andersen didasarkan pada standar *Western European*, sehingga kurang cocok diaplikasikan di negara selatan (Noyoo, 2017). Gough kemudian merumuskan bentuk rezim kesejahteraan yang dapat digunakan di negara berkembang yaitu rezim *insecurity* dan rezim *informal security*. Rezim *informal security* dan *insecurity welfare* adalah kesejahteraan meta-rezim pada 'genus' yang mirip dengan tipologi negara kesejahteraan Esping-Andersen (Gough et al., 2004).

Merujuk pada penjelasan ini, di bagian selanjutnya akan dibahas keterkaitan ideologi negara kesejahteraan yang khas di negara Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia serta pembahasan lebih kritis mengenai ideologi yang tak selalu berkorelasi erat dengan kebijakan.

Bantuan Sosial Lansia

Bantuan sosial merupakan intervensi non-kontribusi yang dirancang untuk membantu individu dan rumah tangga mengatasi kemiskinan dan kerentanan (Carter, Roelen, Enfield, & Avis, 2019). Bantuan sosial menjadi penting untuk diterapkan berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada pasal 22 dan 25 menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan sosial dan mendapatkan hak yang sama atas keamanan dalam kondisi pengangguran, penyakit, cacat, usia lanjut atau kurangnya penghasilan di luar kendalinya (PBB dalam Shahid 2014).

Inklusivitas Bantuan Sosial

Secara sosiologis, inklusi dan eksklusi merupakan dua hal yang berkaitan erat dengan problematika orang-orang yang terpinggirkan. Almann (2013) merumuskan inklusi sebagai

sebuah konsep yang menggambarkan langkah yang ditempuh masyarakat dalam memperlakukan sesamanya untuk membentuk sebuah integrasi sosial pada dunia yang dipenuhi dengan stratifikasi sosial.

Roelen (2014) mengadaptasi konsep inklusi sosial menjadi sesuatu yang lebih spesifik yaitu inklusivitas perlindungan sosial yang memuat tiga parameter yaitu, (1) menjangkau dan mengintervensi semua orang yang sedang membutuhkan perlindungan sosial dengan program yang tepat, (2) membangun ekspektasi realistis tentang apa yang dapat dilakukan individu, rumah tangga, dan komunitas untuk mengatasi kemiskinan atau mencegah mereka jatuh ke dalam kemiskinan lagi, dan (3) menjadi lebih terintegrasi dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dan kerentanan lainnya. Berdasarkan pada konsep tersebut disusunlah tiga kriteria yang menjadi indikator pembahasan pada jurnal ini yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, parameter menjangkau dan mengintervensi semua orang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia internasional bahwa pemerintah harus menyediakan bantuan sosial sebagai jaring pengaman terakhir dalam sistem perlindungan sosial (Vonk & Bambrough, 2020). Kemudian, Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) merumuskan tiga aspek yang dibahas dalam aspek kondisi bantuan dan penerima manfaat yaitu: (1) kelayakan bantuan (*adequacy*), (2) cakupan penerima bantuan (*coverage*) dan (3) akses terhadap bantuan (*Social Protection and Human Rights*, 2021).

Kedua, parameter membangun ekspektasi realistis dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan lansia (Barrientos, Gorman, & Heslop, 2003). Hal ini terlihat pada dampak bantuan sosial yang dijelaskan oleh ILO (2011), *The Office of UN High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) (2021) dan Barrientos (2003) ke dalam aspek (1) kemiskinan dan ketimpangan lansia, (2) hak-hak lansia, dan (3) kesejahteraan intergenerasi.

Ketiga, parameter integrasi dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dimaksudkan dalam pelayanan bantuan sosial yang saling bekerjasama secara horisontal (berbagai program bantuan) maupun vertikal (hirarki koordinasi) dalam rangka memaksimalkan pelayanan dan meningkatkan efisiensi bantuan

(OECD, 2015). Integrasi kebijakan yang didorong dengan institusi yang terstruktur memberikan dampak lebih luas kepada perbaikan kualitas hidup lansia (Barrientos, 2013a). OECD (2015) dan World Bank (2017) menjelaskan parameter ini ke dalam beberapa aspek berikut (1) integrasi antar sektor program bantuan (2) integrasi kebijakan daerah dan pusat, dan (3) revisi kebijakan menuju sistem integrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *systematic review* yang menganalisis literatur-literatur terdahulu tentang penyelenggaraan bantuan sosial lansia. Argumentasi memilih *systematic review* yaitu pertama, secara teoritis *systematic review* jarang digunakan untuk membahas bantuan sosial lansia. Kedua, secara praktis pelaksanaan dan evaluasi bantuan sosial lansia telah ada di negara berpendapatan menengah atas, namun belum dieksplor lebih jauh mengenai inklusivitasnya. Ketiga, *systematic review* cocok digunakan penulis pada saat Covid-19.

Populasi literatur yang dianalisis dalam studi ini adalah seluruh literatur yang fokus pada inklusivitas bantuan sosial lansia di Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia. Jangka waktu literatur yang dianalisis yaitu 10 tahun, mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020 untuk menjaga kebaruan tulisan. Literatur yang dianalisis hanya artikel ilmiah yang berbahasa Inggris. *Database* literatur adalah Google Scholar dan Scopus. Kata kunci topik yang relevan adalah "*inclusive*", "*social assistance*", "*old-age*", "*South Africa*", "*China*", "*Brazil*", dan "*Indonesia*". Penerbit terbanyak berasal dari Wiley Online Library, kemudian disusul oleh Taylor & Francis Online, dan sisanya beragam baik yang berasal dari keempat negara maupun tidak.

Penulis mencari literatur berdasarkan kata kunci di Google Scholar dan Scopus. Kedua *search engine* ini dipilih untuk memfokuskan pencarian data dan mengefektifkan waktu penelitian. Jika terdapat kesamaan artikel yang muncul pada keduanya, maka hanya dihitung satu. Setelah itu, literatur yang didapatkan berjumlah 63 literatur. Dari seluruh literatur tersebut dipilah lagi berdasarkan judul, abstrak, dan kesimpulan yang benar-benar memuat kata kunci "*inclusive*", "*social assistance*", "*old-age*" pada setiap literturnya. Selanjutnya terpilih 54 literatur (25 dari Google Scholar dan 29

dari Scopus). Kemudian jurnal-jurnal tersebut dipilah lagi berdasarkan kesesuaian isinya yang memuat aspek inklusivitas bantuan sosial lansia yang sudah dipaparkan dalam kerangka teori ke dalam bentuk tabel. Terakhir, terkumpul 25 literatur (14 dari Google Scholar dan 11 dari Scopus) yang digunakan sebagai sumber data utama penelitian karena judul, abstrak, isi dan kesimpulannya memuat aspek inklusivitas bantuan sosial lansia yang dimaksudkan dalam kerangka teori.

Studi ini menggunakan teknik analisis data *framework analysis* yaitu upaya menganalisis data dengan memilah data, memetakannya dan menyortir data yang sesuai dengan batasan (topik dan waktu) yang telah ditetapkan sebelumnya (Srivastava & Thomson, 2009). Metode ini digagas oleh Ritchie dan Spencer (1994) melalui lima tahapan yaitu familiarisasi, identifikasi kerangka teoritik, pengindeksan, membuat tabel, dan interpretasi. Berdasarkan tahapan ini, penulis pada awalnya membuat review dari data penelitian kualitatif bantuan sosial lansia yang dianalisis dengan fokus inklusivitas sistem dan tujuannya di Afrika Selatan, Brazil, China, dan Indonesia. Kedua, penulis mengenali topik yang muncul dalam kumpulan data penelitian bantuan sosial lansia. Ketiga, mengidentifikasi literatur bantuan sosial lansia yang sesuai dengan topik inklusivitas dari fokus sistem dan tujuannya. Keempat, mengelompokkan data literatur bantuan sosial lansia ke dalam tabel. Kelima, yaitu menginterpretasikan karakteristik kunci dari tabel yang telah dibuat

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan variasi bantuan sosial lansia di empat negara, yaitu Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia dilihat dari beberapa aspek, yaitu nama program, tujuan program, bantuan tunai, bantuan non-tunai, skema bantuan, bantuan di tingkat daerah dan kriteria penerima manfaat.

Bantuan Sosial Lansia di Afrika Selatan

Pada 2019, Afrika Selatan memiliki 5% persen populasi lansia atau setara dengan 3.171.080 penduduk lansia (World Bank, 2019). Kurang lebih, 40% dari jumlah lansia di Afrika Selatan tergolong dalam kemiskinan (Statistics South Africa, 2014). Tingkat pengangguran yang tinggi dan penyakit HIV mendorong perlunya pelaksanaan jaminan

sosial bagi lansia. Pembahasan kali ini, fokus pada bantuan sosial di Afrika Selatan yaitu *Old Age Pension* atau *Old Age Grant* (OAG). Bantuan ini bertujuan mengentaskan kemiskinan, menciptakan komunitas yang berkelanjutan dan mempromosikan kesejahteraan sosial lansia (Van Dijk & Mokgala, 2014). Pelaksanaan OAG diselenggarakan oleh *South African Social Security Agency* (SASSA). OAG merupakan salah satu bantuan yang paling besar dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan dengan *Child Grant* dan *Disability Grant*.

Bantuan Sosial Lansia di Brazil

Jumlah lansia Brazil sekitar 9% dari total populasi penduduk atau setara dengan 19,525,474 orang (World Bank, 2019). Sekitar 8% persen diantara lansia tersebut berada pada kemiskinan (OECD, 2019). Oleh karena itu, Pemerintah Brazil menyelenggarakan bantuan sosial yang disebut dengan BPC (*Benefício de Prestação*). BPC bertujuan untuk memperluas hak lansia dan disabilitas (Barrientos, 2013b). Program ini dijalankan oleh *Instituto Nacional do Seguro Social* (INSS/Institut Jaminan Sosial Brazil) (Oliveri, 2016).

Bantuan Sosial Lansia di China

China merupakan negara berpenduduk terbanyak di dunia dengan presentase lansianya sebesar 11% dari total populasi yaitu 160,348,563 orang lansia (World Bank, 2019). Kemiskinan pada lansia di China cukup besar yaitu 39% dari total lansia (OECD, 2019). Merujuk pada kondisi ini, Pemerintah China menerapkan beberapa sistem pensiun lansia. Pada pembahasan kali ini lebih fokus pada kebijakan NRPS (*New Rural Pension Scheme*) karena mayoritas lansia yang mengalami kemiskinan berada di perdesaan dan ketersediaan literatur penelitian yang lebih banyak membahas dinamika NRPS. Program ini pertama dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China.

Bantuan Sosial Lansia di Indonesia

Indonesia memiliki jumlah lansia sebesar 6% dari total populasi penduduk atau setara dengan 16,373,666 orang lansia lewat bantuan sosial lansia (World Bank, 2019). Kurang lebih 25% dari total lansia di Indonesia rentan mengalami kemiskinan (Priebe & Howell, 2014). Oleh karena itu, dibuatlah program Bantuan Lanjut Usia (Bantu LU) dikenal sebagai

Tabel 1
Ringkasan Program Bantuan Sosial Lansia di Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia

Aspek	Afrika Selatan	Brazil	China	Indonesia
Nama Program	<i>Old Age Grants / Old Age Pension</i> (OAG)	<i>Beneficio de Prestacao Continuada</i> (BPC)	<i>New Rural Pension Scheme</i> (NRPS)	Bantuan Lanjut Usia (Bantu LU)
Tujuan Program	Mengentaskan kemiskinan, menciptakan komunitas yang berkelanjutan dan mempromosikan kesejahteraan sosial warga negara.	Memperluas hak atas perlindungan sosial bagi mereka yang tidak mampu bekerja, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.	Menjamin kebutuhan dasar penduduk pedesaan ketika mereka tua.	Membantu lansia yang tidak dapat merawat dirinya sendiri, sakit-sakitan, tidak memiliki akses, yang mengakibatkan lansia benar-benar memerlukan bantuan dari orang lain.
Bantuan Tunai	R1.890 (setara dengan 1.830.000 rupiah per bulan)	\$2.5 per hari atau setara dengan 1.778.000 per bulan.	55 CNY atau 121.974 rupiah per bulan.	300.000 rupiah per bulan sampai 2011; 2012 berkurang menjadi 200.000 rupiah.
Bantuan Non Tunai	Tidak dijelaskan dengan terperinci	Tidak dijelaskan dengan terperinci	Bantuan pada setiap daerah berbeda.	Program Rehabilitasi Sosial Lanjut usia (Progres LU) menyediakan Bantu LU, perawatan sosial, dukungan keluarga dan terapi sosial
Skema Bantuan	Pembayaran kepada penerima bantuan melalui: (1) tunai pada titik pembayaran dan hari tertentu, (2) setoran elektronik ke rekening bank atau postbank, (3) institusi (misalnya panti jompo).	Transfer tunai menggunakan sistem perbankan reguler. Beberapa cabang bank beroperasi di kantor pos, agen lotere, dan perusahaan komersial. Setiap penerima memiliki kartu magnetik untuk menarik uang. Dapat diwakilkan oleh orang lain yang berwenang untuk mengambilnya.	Meskipun partisipasi bersifat sukarela, orang dewasa yang berusia kurang dari 45 tahun ketika NRPS diperkenalkan, diminta untuk berkontribusi setidaknya selama 15 tahun agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pensiun dasar mereka sendiri. Kontribusi pribadi tahunan mereka terakumulasi di akun masing-masing.	Bantuan dari pemerintah dikirim melalui kantor cabang di daerah masing-masing yang akan langsung disalurkan ke rumah penerima manfaat. Selain itu, bisa juga melalui fasilitator program yang akan mendatangi rumah penerima manfaat. Pada beberapa kasus, lansia mengambil langsung ke kantor penyalur bantuan.
Bantuan di Tingkat Daerah	Tidak dijelaskan secara terperinci	Tidak dijelaskan secara terperinci	Bantuan lansia menjadi satu di NRSP, namun jumlah bantuan yang didapatkan berbeda-beda di tiap daerah	ASLURETI di Aceh bagi lansia di atas 70 tahun yang tidak mendapatkan Bantu LU, Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di Jakarta, dan <i>home care</i> serta pelatihan ekonomi untuk lansia di Yogyakarta
Kriteria Penerima Manfaat	Lansia berusia 60 tahun ke atas, warga negara Afrika Selatan, tinggal di Afrika Selatan, tidak menerima bantuan lainnya, tidak dirawat oleh instansi pemerintah, dan persyaratan pendapatan.	Memiliki pendapatan kurang dari seperempat upah minimum, dan berusia 65 tahun ke atas	Peserta berusia di bawah 45 tahun ketika NRPS diluncurkan diharuskan untuk berkontribusi setidaknya 15 tahun agar memenuhi syarat untuk manfaat pensiun pada usia 60 tahun	lansia 60 tahun ke atas dengan penyakit kronis, dan miskin; lansia berusia 70 tahun ke atas yang tidak memiliki kemampuan untuk hidup mandiri; memiliki identitas

Sumber: Olahan Data Penulis, 2021

sarana bantuan sosial bagi lansia di Indonesia sejak tahun 2019. Bantu LU berada di bawah pengawasan Kementerian Sosial.

Diskusi

Kondisi Bantuan dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial Lansia

Berdasarkan aspek kelayakan bantuan, keempat negara menunjukkan kondisi yang cukup variatif. Pada kasus di Afrika Selatan, bantuan sosial yang diterima lansia di wilayah ini sebenarnya sudah cukup layak. Namun, jumlah bantuan masih bisa ditingkatkan lagi. Kemudian, bantuan sosial lansia di Brazil cukup layak. Namun, bantuan ini dapat lebih ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kompleks lainnya. Sementara itu, bantuan sosial lansia di China menunjukkan peningkatan konsumsi kebutuhan sehari-hari, peningkatan input produksi pertanian dan peningkatan perawatan kesehatan. Selanjutnya, kondisi bantuan sosial lansia di Indonesia dapat dikatakan belum layak, karena hanya bisa digunakan untuk membeli makanan pokok.

Beralih ke aspek cakupan penerima bantuan, Afrika Selatan dan China menunjukkan cakupan penerima yang lebih layak dibandingkan Brazil dan Indonesia. Pada kasus Afrika Selatan penerima bantuan sosial cukup banyak yaitu sekitar 74%. Data ini didukung adanya alokasi dan perhatian yang besar pada OAG oleh pemerintah Afrika Selatan. Selanjutnya, cakupan penerima bantuan lansia di China cukup banyak kurang lebih 71% lansia. Data ini didukung pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perlindungan Sosial (2013) dalam Chen, Bengtsson, & Helgertz (2015) yang menyebutkan lebih 60% lansia berpartisipasi. Sementara itu, lansia yang menerima bantuan di Brazil masih sedikit, kurang lebih 12%. Hal ini didukung pernyataan bahwa akses pada perlindungan sosial lansia ini masih sulit dijangkau di daerah terpencil Brazil. Kemudian, lansia yang menerima bantuan sosial di Indonesia sangat sedikit yaitu 1,7% lansia. Hal ini disebabkan pendataan yang buruk, kebijakan yang tidak fokus pada kesejahteraan lansia, dan kondisi geografis yang menghambat perencanaan bantuan lansia.

Pada aspek akses terhadap bantuan, lansia di Afrika Selatan terkendala secara fisik dan informasi mengenai bantuan. Hal ini terlihat dari kondisi lansia pada beberapa daerah yang kesulitan mengakses ATM dan rawan terkena perampokan. Lansia di Brazil juga

mengalami kesulitan akses karena perbedaan sarana dan prasarana pada masing-masing wilayah. Selanjutnya, akses lansia di China juga terkendala di berbagai daerah, karena layanan bantuan tidak tersedia di perdesaan. Terakhir, yaitu akses lansia di Indonesia juga sulit dijangkau karena kondisi geografis maupun jasmani, sehingga perlu bantuan fasilitator program. Dengan demikian, keempat negara menunjukkan adanya kendala lansia hal akses terhadap bantuan. Ringkasan pembahasan dari aspek kondisi bantuan dan penerima manfaat dapat dilihat pada Tabel 2.

Dampak Bantuan Sosial Lansia

Berdasarkan aspek kemiskinan dan ketimpangan, pada kasus Afrika Selatan, bantuan sosial lansia mampu membuat lansia bertahan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan lansia sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Beralih ke Brazil, bantuan sosial lansia berpengaruh mengurangi kemiskinan lansia yang terlihat dari berkurangnya pekerja lansia. Sementara itu, bantuan sosial lansia di China juga meningkatkan kemampuan konsumsi lansia dan meningkatkan kemampuan produksi pertanian. Namun, masih ada kesenjangan desa dan kota. Selanjutnya, bantuan sosial lansia di Indonesia memberikan dampak yang baik dalam penurunan kemiskinan pada lansia, namun perlu ditopang bantuan lainnya. Dengan demikian, bantuan sosial lansia dapat menurunkan kemiskinan di keempat negara.

Beralih ke aspek hak-hak lansia, pada kasus Afrika Selatan, laki-laki dan perempuan sebanding dalam mendapatkan bantuan sosial lansia. Namun terkadang lansia belum diberlakukan secara sopan dan bermartabat oleh fasilitator penyalur bantuan sosial lansia. Sementara itu, bantuan sosial lansia di Brazil belum signifikan karena kesetaraan antara laki – laki dan perempuan belum diwujudkan dengan maksimal. Lebih lanjut lagi, pada kasus China, terjadi kesenjangan hak dalam menerima bantuan antara lansia di desa dan di kota. Selanjutnya, pada kasus bantuan sosial lansia di Indonesia, belum terjadi kesetaraan hak untuk seluruh lansia, karena kecenderungan bantuan yang diberikan pada lansia 70 tahun keatas dan atau memiliki penyakit kronis. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan hak-hak lansia dalam mengakses bantuan sosial pada keempat negara, baik kesenjangan antar gender, wilayah maupun usia.

Tabel 2
Kondisi Bantuan dan Penerima Manfaat

No.	Aspek	Afrika Selatan	Brazil	China	Indonesia
1.	Kelayakan Bantuan	Bantuan bersifat layak karena dapat digunakan untuk waktu yang cukup lama. Sumber: (Ralston, Schatz, Menken, Gómez-Olivé, & Tollman, 2019); (Van Dijk & Mokgala, 2014); (Ralston, Schatz, Menken, Gómez-Olivé, & Tollman, 2015)	Bantuan cukup layak karena besarnya sesuai dengan upah minimum masyarakat. Sumber: (Arza, 2019); (Medeiros & Diniz, 2015)	Bantuan cukup layak untuk kebutuhan, perawatan dan pertanian. Sumber: (Zheng & Zhong, 2016); (Cheng, Liu, Zhang, & Zhao, 2018)	Bantuan belum layak karena hanya mampu untuk membeli makanan pokok. Sumber: (Adioetomo, Howell, Mcpherson, & Priebe, 2014); (Priebe & Howell, 2014); (MAHKOTA, 2017)
2.	Cakupan Penerima Bantuan	Penerima bantuan cukup banyak (74%) Sumber: (Kollamparambil & Etinzock, 2019); (Ralston et al., 2019); (Ralston et al., 2015)	Penerima bantuan masih sedikit (12%) Sumber: (Arza, 2019); (Medeiros & Diniz, 2015)	Penerima bantuan cukup banyak (71%) Sumber: (Chen, Bengtsson, & Helgertz, 2015); (Cheng et al., 2018)	Penerima bantuan sangat sedikit (1.7%) Sumber: (Adioetomo et al., 2014); (Priebe & Howell, 2014); (MAHKOTA, 2017)
3.	Akses terhadap Bantuan	Terkendala secara fisik dan informasi Sumber: (Ralston et al., 2019); (Ralston et al., 2015); (Noyoo, 2017a); (Van Dijk & Mokgala, 2014)	Terkendala secara fisik dan informasi Sumber: (Medeiros & Diniz, 2015); (Arza, 2019); (Vaitsman & Lobato, 2017)	Terkendala secara fisik dan informasi Sumber: (Shen, Johnson, Chi, & Williamson, 2020); (Liu & Cheung, 2013)	Terkendala secara fisik dan informasi Sumber: (Adioetomo et al., 2014); (Priebe & Howell, 2014)

Sumber: Olahan Data Penulis, 2021

Berdasarkan aspek kesejahteraan intergenerasi, pada kasus Afrika Selatan, OAG membantu anggota keluarga lainnya dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian, bantuan sosial di Brazil membantu lansia dan anggota keluarganya untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi jumlah tenaga kerja lansia. Sementara itu, bantuan sosial lansia di China dikhawatirkan memunculkan ketimpangan antar generasi karena anak yang berbeda kemampuan harus menyokong kebutuhan orang tua yang sama. Terakhir, bantuan sosial lansia di Indonesia mendorong peningkatan kemampuan pada generasi selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial lansia memberikan dampak positif bagi kesejahteraan intergenerasi, walaupun terdapat kemungkinan memunculkan ketimpangan antar generasi. Ringkasan pembahasan dari aspek dampak bantuan sosial lansia dapat dilihat pada Tabel 3.

Integrasi Bantuan Sosial Lansia

Pada aspek integrasi antar bantuan program di Afrika Selatan, aturan kebijakan yang mendorong terciptanya integrasi telah

ditetapkan, meski pada pelaksanaannya belum maksimal. Kemudian, bantuan sosial lansia di Brazil telah mencoba penerapan integrasi antar bantuan sosial, terlihat dari koordinasi antara program bantuan sosial dengan ketenagakerjaan dan upaya ekonomi inklusif. Sementara itu, ada usaha integrasi antar bantuan sosial lansia di China, namun belum ada bukti kuat dampak dari integrasi ini. Selanjutnya, kondisi bantuan sosial lansia di Indonesia telah terjadi koordinasi antar lembaga dan bantuan, namun belum maksimal. Dapat disimpulkan bahwa integrasi antara bantuan sosial lansia dengan bantuan sosial lainnya masih merupakan kendala; meskipun Brazil menunjukkan model integrasi yang lebih maju dibandingkan tiga negara lainnya.

Beralih ke aspek integrasi pusat dan daerah, pada kasus di Afrika Selatan, ada usaha untuk mengintegrasikan kelembagaan pusat dan daerah agar mekanisme lebih mudah dilakukan. Kemudian, terjadi integrasi antara penyelenggara bantuan sosial di pusat dan daerah di Brazil namun, masih terdapat masalah pada koordinasi yang masih bersifat informal. Selanjutnya, integrasi bantuan antar lokal dan

Tabel 3
Dampak Bantuan Sosial Lansia

No.	Aspek	Afrika Selatan	Brazil	China	Indonesia
1.	Kemiskinan dan Ketimpangan	OAG meningkatkan kesejahteraan lansia sehingga mengurangi kemiskinan lansia Sumber: (Ralston et al., 2019); (Van Dijk & Mokgala, 2014); (Kollamparambil & Etinzock, 2019); (Barrientos, Møller, Saboia, Lloyd-Sherlock, & Mase, 2013); (Ralston et al., 2015)	BPC cukup signifikan mengurangi kemiskinan dan kerentanan lansia Sumber: (Barrientos, 2013); (Oliveri, 2016); (Barrientos et al., 2013); (Kassouf & de Oliveira, 2014)	NRPS meningkatkan kemampuan konsumsi lansia Sumber: (Shen et al., 2020); (You & Niño-Zarazúa, 2019); (Zheng & Zhong, 2016); (Chen et al., 2015)	Bantu LU menurunkan kemiskinan lansia, namun belum signifikan Sumber: (Adioetomo et al., 2014); (Priebe & Howell, 2014); (MAHKOTA, 2017); (TNP2K & SMERU Research Institute, 2020)
2.	Hak-Hak Lansia	Laki-laki dan perempuan sebanding dalam mendapatkan bantuan sosial lansia namun beberapa fasilitator belum melayani lansia secara bermartabat. Sumber: (Ralston et al., 2019); (Ralston et al., 2015); (Barrientos et al., 2013); (Kollamparambil & Etinzock, 2019); (Van Dijk & Mokgala, 2014)	Kesetaraan antara laki – laki dan perempuan belum diwujudkan dengan maksimal Sumber: (Barrientos, 2013); (Arza, 2017); (Barrientos et al., 2013); (Medeiros & Diniz, 2015)	Kesenjangan hak lansia yang berada di desa dan di kota Sumber: (Shen et al., 2020); (Liu & Cheung, 2013)	Hak lansia belum setara karena lebih banyak lansia sangat tua yang menerima bantuan Sumber: (Adioetomo et al., 2014); (Priebe & Howell, 2014); (MAHKOTA, 2017); (TNP2K & SMERU Research Institute, 2020)
3.	Kesejahteraan Intergenerasi	OAG membantu anggota keluarga lainnya memenuhi kebutuhan Sumber: (Ralston et al., 2015); (Noyoo, 2017a); (Ralston et al., 2019); (Kollamparambil & Etinzock, 2019)	BPC membantu memberikan dampak <i>spillover</i> untuk anggota keluarga lainnya Sumber: (Barrientos, 2013); (Kassouf & de Oliveira, 2014)	Kekhawatiran munculnya ketimpangan antar generasi Sumber: (You & Niño-Zarazúa, 2019); (Chen et al., 2015)	Ada peningkatan kemampuan generasi selanjutnya dari bantuan lansia yang diberikan Sumber: (MAHKOTA, 2017); (TNP2K & SMERU Research Institute, 2020)

Sumber: Olahan Data Penulis, 2021

nasional belum terjadi dengan baik di China. Hal ini menyebabkan sedikit petugas yang memenuhi standar pada beberapa daerah, dana yang tidak mencukupi, kondisi yang sulit dan metode yang usang. Selanjutnya, perihal bantuan sosial lansia di Indonesia, pemerintah memberikan kebijakan otonomi daerah, namun timbul potensi ketimpangan antar daerah. Sama halnya dengan integrasi antar bantuan sosial, integrasi antara pemerintah pusat dan daerah juga masih merupakan kendala pada keempat negara yang dikaji.

Berdasarkan aspek revisi kebijakan integrasi, pada kasus di Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia mengalami perubahan yang lebih integratif. Penjelasan dapat dilihat di Tabel 4.

Keterkaitan Ideologi dengan Kebijakan Bantuan Sosial Lansia

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, Noyoo (2017b) menyimpulkan bahwa Afrika Selatan menerapkan rezim kesejahteraan yang berbentuk *hybrid* karena mengkolaborasikan rezim liberal dan sosial demokrat. Kondisi ini terlihat dari penyelenggaraan model redistributif Skandinavia dalam bentuk layanan untuk masyarakat miskin; dan rezim kesejahteraan liberal Anglo-Saxon yang menargetkan layanan menggunakan *mean-tested*.

Sementara itu pada negara Brazil, ideologi yang sedang dialami adalah pergeseran antara liberalisme inklusif menuju *developmental welfare* (Leubolt, 2014). Kondisi liberalisme

Tabel 4
Integrasi Bantuan Sosial Lansia

No.	Aspek	Afrika Selatan	Brazil	China	Indonesia
1.	Integrasi antar sektor program bantuan	Ada aturan yang mendorong terciptanya integrasi, meski pada penerapannya belum maksimal. Sumber: (Noyoo, 2017a); (Ralston et al., 2019)	Ada usaha untuk melakukan integrasi antara program bantuan sosial dengan ketenagakerjaan dan ekonomi inklusif. Integrasi juga dilakukan dalam monitoring bantuan. Sumber: (Barrientos, 2013); (Medeiros & Diniz, 2015)	Ada usaha integrasi namun belum ada bukti kuat dampak dari integrasi ini Sumber: (Liu & Cheung, 2013); (Cheng et al., 2018)	Koordinasi antar lembaga dan bantuan memungkinkan, namun belum maksimal Sumber: (Priebe & Howell, 2014); (MAHKOTA, 2017); (TNP2K & SMERU Research Institute, 2020)
2.	Integrasi pusat dan daerah	Ada usaha untuk mengintegrasikan kelembagaan pusat dan daerah agar mekanisme lebih mudah dilakukan Sumber: (Van Dijk & Mokgala, 2014); (National Planning Comission, 2013)	Terjadi integrasi pusat dan daerah, namun belum secara formal Sumber: (Barrientos, 2013); (Vaitsman & Lobato, 2017)	Adanya kolaborasi bantuan sosial lansia di daerah perdesaan dan di perkotaan, namun belum signifikan Sumber: (Shen et al., 2020); (Liu & Cheung, 2013)	Pemerintah memberikan kebijakan otonom daerah, namun integrasi lokal dan nasional masih perlu ditingkatkan Sumber: (TNP2K & SMERU Research Institute, 2020); (Sumini, Sukamdi, Pangaribowo, Keban, & Darwin, 2020); (MAHKOTA, 2017)
3.	Revisi kebijakan menuju integrasi	1928 → bantuan untuk kulit putih dan berwarna, 1944 → bantuan juga mencakup kulit hitam 1990 → bantuan mayoritas untuk kulit hitam 2010 → berdampak besar pada kestabilan pendapatan dan kesehatan lansia Sumber: (Ralston et al., 2015); (Kollamparambil & Etinzock, 2019); (Van Dijk & Mokgala, 2014)	Konstitusi 1988 (berperan penting meningkatkan akses lansia dalam memperoleh bantuan), 1993 → terbit LOA (<i>Social Assistance Law</i>), 1996 → BPC diimplementasikan 1998 → Lansia 70 tahun menjadi 67 tahun 2004 → Lansia 67 tahun menjadi 65 tahun Sumber: (Barrientos, 2013); (Barrientos et al., 2013); (Arza, 2017)	1986 <i>Pilot Project</i> 1998 → <i>Pilot Project</i> dihentikan 2009 → NRPS dibentuk 2011 → URPS dibentuk 2014 → NRPS dan URPS digabung Sumber: (Shen et al., 2020); (Cheng et al., 2018)	2006-2011 → JSLU 2012-2017 → ASLU 2017-2018 → ASLU 2019-2021 → Bantu LU Sumber: (TNP2K & SMERU Research Institute, 2020); (Adioetomo et al., 2014)

Sumber: Olahan Data Penulis, 2021

inklusif merujuk pada kebijakan ekonomi liberal yang disertai dengan pengentasan kemiskinan melalui kerja sama dengan pihak lain (korporasi) yang berkewajiban untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian, terjadi pergeseran menuju *developmental welfare* yang ditandai

dengan pengurangan ketidaksetaraan sebagai faktor penting untuk meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini terlihat dari kebijakan yang mengutamakan pengukuran berdasarkan keluarga.

Beralih ke Pemerintahan China, negara ini menerapkan ideologi pragmatisme

kesejahteraan paternalistik karena pengeluaran sosial pemerintah ditetapkan berdasarkan kapasitas fiskal pemerintah tingkat daerah dan program kesejahteraan dikaitkan dengan dikotomi antara sektor formal dan informal perkotaan (Mok & Qian, 2019). Mok dan Qian (2019) menjelaskan bahwa pemerintah daerah China, masih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, sembari menawarkan program sosial untuk menciptakan lingkungan stabil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan sosial dilaksanakan atas dasar pemikiran pembangunan ekonomi ketimbang kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini tampak dari pelaksanaan NRSP yang bersifat *volunteer* menandakan pelibatan keluarga lansia untuk turut berkontribusi bersama.

Terakhir, Indonesia sedang mengalami transisi dari rezim produktivis menuju universalis, namun pelaksanaannya masih terhambat (Yuda, 2018). Hal ini dijelaskan Yuda (2018) ketika Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Abdurrahman Wachid menganut rezim produktivis dimana penyediaan perlindungan sosial terbatas untuk pegawai negeri sipil dan militer. Kemudian, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo menginginkan perubahan menuju universalis, ditandai dengan penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Namun, hal ini bukan merupakan rezim universalis secara utuh, karena karakteristik produktivis juga masih diselenggarakan di Indonesia. Jika kita kaitkan dengan analisis inklusivitas bantuan sosial lansia, terlihat bahwa pelaksanaan bantuan masih menggunakan *means-tested* dan belum menyeluruh bagi seluruh lansia.

Meskipun keempat negara memiliki kekhasan ideologi yang tampaknya mempengaruhi kebijakan, para pemimpinnya harus menyesuaikan kebijakan dengan realitas proses globalisasi, perubahan demografis, dan penuaan populasi (Menachem, 2015). Hal ini terlihat dari kebijakan masing-masing negara yang tidak menerapkan ideologi secara kaku, sehingga penyesuaian pada kondisi eksternal harus dilakukan.

Refleksi dan Kritik Pelaksanaan Bantuan Sosial Lansia

Refleksi dari pembahasan inklusivitas bantuan sosial lansia di Afrika Selatan, Brazil,

China dan Indonesia memunculkan tiga temuan besar. Pertama, pentingnya pemahaman mendalam tentang makna lansia. Seringkali lansia dinarasikan berdasarkan fisik dan umur. Hal ini dikemukakan dalam buku *The Gift of Generations: Japanese and American Perspectives on Aging and the Social Contract* bahwa maskarakat Jepang (dan mungkin banyak negara Asia lainnya) melihat lansia sebagai orang yang rentan dan perlu bantuan (Hashimoto dalam Agree, 2016). Padahal, lansia berperan merawat cucu, menopang kebutuhan anaknya yang belum mencapai kemandirian, bahkan bertanggung jawab untuk anggota keluarga lainnya (Schröder-Butterfill, 2004).

Kedua, perlunya penyediaan bantuan yang disesuaikan dengan kondisi lansia produktif (potensial) dan non produktif (tidak potensial). Menurut UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, bantuan yang diperuntukkan pada lansia non produktif meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; serta bantuan sosial. Sementara itu, untuk lansia produktif mendapatkan bantuan yang sama dengan lansia tidak potensial ditambah dengan pelayanan kesempatan kerja (memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya) serta pelayanan pendidikan dan pelatihan (meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya). Kemudian, jika dikaitkan dengan rezim kesejahteraan dan kondisi pada empat negara tersebut yang cenderung *means-tested* dan rezim *liberal-social*, terlihat bahwa bantuan sosial lansia non produktif lebih diutamakan dibandingkan dengan bantuan sosial lansia produktif. Hal ini menyebabkan lansia sulit mandiri secara ekonomi.

Ketiga, pilihan *universalism* atau *targeting*. Terkait dengan pembahasan inklusivitas bantuan sosial lansia di Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia terlihat bahwa penggunaan *means-tested* memang mengalami kekurangan. Pandangan universalisme dapat menjadi pilihan, namun perlu alokasi dana bantuan yang lebih banyak. *Stratified universalism* berupa

penggabungan *universalism* dan stratifikasi nilai bantuan sosial menurut status kebutuhan individu bisa menjadi jawaban (Filgueira dalam Sandberg, 2016).

Kesimpulan

Merujuk pada penjelasan inklusivitas bantuan sosial lansia di Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia dapat disimpulkan bahwa inklusivitas bantuan sosial lansia belum sepenuhnya inklusif. Berdasarkan aspek kondisi bantuan dan penerima manfaat bantuan sosial lansia, kebutuhan dasar hidup lansia tercukupi, namun keperluan perawatan dan kemandirian ekonomi perlu ditingkatkan. Sementara itu, cakupan penerima bantuan bervariasi, dimana Afrika Selatan dan China lebih tinggi persentasenya dibandingkan Brazil dan Indonesia. Kemudian, pada akses terhadap bantuan, keempat negara cenderung masih belum maksimal.

Berdasarkan pada aspek dampak bantuan sosial terhadap lansia, keempat negara mengalami penurunan kemiskinan dan ketimpangan lansia, meski hasilnya belum signifikan. Selanjutnya, keempat negara memenuhi hak lansia perempuan, namun kesenjangan lansia yang tinggal di desa dan kota tinggi. Sementara itu, dalam hal kesejahteraan intergenerasi, bantuan sosial lansia memberikan efek yang baik untuk mengeluarkan generasi selanjutnya dari lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan aspek integrasi bantuan sosial lansia, terdapat usaha untuk melakukan integrasi antar program bantuan. Namun belum ada yang benar-benar maksimal dalam pelaksanaannya. Sementara itu, untuk integrasi antara pemerintah pusat dan daerah, secara koordinasi struktural terjadi; namun demikian, penyediaan kantor pelayanan masih terbatas pada beberapa daerah. Selanjutnya, pada revisi kebijakan menuju integrasi, keempat negara menunjukkan komitmen yang cukup besar dalam memperbaiki peraturan kebijakannya dari tahun ke tahun.

Berdasarkan keterkaitan ideologi dan ketergantungan keluarga dengan inklusivitas bantuan sosial menunjukkan bahwa keempat negara memiliki perbedaan rezim kesejahteraan. Oleh karena itu, kebijakan pada setiap negara perlu disesuaikan dengan potensi yang ada pada tiap negara.

Implikasi inklusivitas bantuan sosial lansia terhadap kebijakan di masa depan adalah

pemahaman yang lebih luas mengenai lansia. Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka terlihat bahwa hasil studi ini mendukung argumen penulis bahwa pemerintah Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia, sebagai negara berpendapatan menengah atas, melaksanakan bantuan sosial lansia, meskipun hasilnya belum maksimal dalam menjamin kesejahteraan seluruh lansia.

Saran

Saran yang diberikan untuk pemerintah agar pemerintah meningkatkan akses dan cakupan penerima bantuan. Sementara itu, untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan studi perlindungan sosial lansia yang membahas aspek jaminan sosial lansia dan mengkaji lebih banyak negara dan aspek lainnya yang layak diangkat seperti keberlanjutan bantuan sosial lansia.

Referensi

- Adioetomo, S. M., Howell, F., Mcpherson, A., & Priebe, J. (2014). Social Assistance for The Elderly: The Role of The Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Programme in Fighting Old Age Poverty, (February).
- Agree, E. M. (2016). Book reviews: The Gift of Generations: Japanese and American Perspectives on Aging and the Social Contract by Akiko Hashimoto. *American Journal of Sociology*. University of Chicago Press. doi: <https://doi.org/10.1111/j.0021-8774.2005.00541.x>
- Allman, D. (2013). The sociology of social inclusion. *SAGE Open*, 3(1), pp. 1–16. doi: <https://doi.org/10.1177/2158244012471957>
- Andari, S. (2020). Dampak Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Meningkatkan Kualitas Hidup. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43, pp. 67–78. Retrieved from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2202>
- Appiah, J. O., Agyemang-Duah, W., Peprah, C., Adei, D., Peprah, P., & Fordjour, A. A. (2020). Transportation barriers to formal healthcare utilisation and associated factors among poor older people under a social protection programme in Ghana. *Journal of Transport and Health*, 19(November), 100965. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jth.2020.100965>
- Arza, C. (2017). Non-contributory benefits, pension re-reforms and the social protection of older women in Latin America. *Social Policy*

- and Society*, 16(3), pp. 361–375. doi: <https://doi.org/10.1017/S1474746416000208>
- Arza, C. (2019). Basic Old-Age Protection in Latin America: Noncontributory Pensions, Coverage Expansion Strategies, and Aging Patterns across Countries. *Population and Development Review*, 45(S1), pp. 23–45. doi: <https://doi.org/10.1111/padr.12267>
- Bambra, C. (2007). Going beyond the three worlds of welfare capitalism: Regime theory and public health research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 61(12), pp. 1098–1102. doi: <https://doi.org/10.1136/jech.2007.064295>
- Barrientos, A. (2003). Non-contributory pensions and poverty prevention A comparative study of Brazil and South Africa. Final Report, DFID Project R7897, Pensions and Poverty Prevention Research. Retrieved from <http://idpm.man.ac.uk/ncpps%5Cnhttp://www.globalaging.org/pension/world/2004/noncontributory.pdf>
- Barrientos, A. (2013). The Rise of Social Assistance in Brazil. *Development and Change*, 44(4), pp. 887–910. doi: <https://doi.org/10.1111/dech.12043>
- Barrientos, A., Møller, V., Saboia, J., Lloyd-Sherlock, P., & Mase, J. (2013). “Growing” social protection in developing countries: Lessons from Brazil and South Africa. *Development Southern Africa*, 30(1), pp. 54–68. doi: <https://doi.org/10.1080/0376835X.2013.756098>
- Carter, B., Roelen, K., Enfield, S., & Avis, W. (2019). Social Protection: Topic guide. *K4D Emerging Issues Report*. Brighton, UK: Institute of Development Studies.
- Chen, Z., Bengtsson, T., & Helgertz, J. (2015). Labor Supply Responses to New Rural Pension Insurances in China: A Regression Discontinuity Approach. *Lund Papers in Economic History. Population Economics*, (139).
- Cheng, L., Liu, H., Zhang, Y., & Zhao, Z. (2018). The health implications of social pensions: Evidence from China’s new rural pension scheme. *Journal of Comparative Economics*, 46(1), pp. 53–77. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.12.002>
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Polity Press.
- Feng, W. (2012). Social exclusion of the elderly in contemporary China: One empirical study based on the surveys in six provinces. *Organization for Economic Co-Operation and Development. Retrieved May, 20(2013)*, pp. 7–28. Retrieved from <http://www.oecd.org/dev/pgd/46837621.pdf>
- Goldani, A. M. (2010). The challenges of ageism in Brazil. *Educacao e Sociedade*, 31(111), pp. 411–434. doi: <https://doi.org/10.1590/s0101-73302010000200007>
- Gough, I., Wood, G., Barrientos, A., Bevan, P., Davis, P., & 2004, G. R. (2004). *Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America*. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
- Hujo, K., & Cook, S. (2012). The Political Economy of Social Pension Reform in Asia. In S. W. Handayani & B. Babajanian (Eds.), *Social Protection for Older Persons Social Pensions in Asia* (pp. 11–52). Asian Development Bank.
- ILO (2011), Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization, International Labour Organization, Geneva, Switzerland, http://www.ilo.org/global/publications/ilobookstore/orderonline/books/WCMS_165750/lang--en/index.htm
- ILO. (2014). *Social Protection for Older Persons: Key Policy Trends and Statistics*. (I. Director of the Social Protection Department, Ed.), *Social Protection Policy Papers* (Vol. 11). Retrieved from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_310211.pdf
- Johnson, S. (2015). How can older people play a bigger role in society? *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/society/2015/mar/30/how-why-older-people-valued-knowledge-experience>
- Kassouf, A. L., & de Oliveira, P. R. (2014). Impact Evaluation of the Brazilian Non-Contributory Pension Program Beneficio De Prestaaao Continuada (BPC) on Family Welfare. *SSRN Electronic Journal*, (October). doi: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2374388>
- Kollamparambil, U., & Etinzock, M. N. (2019). Subjective well-being impact of old age pension in south africa: A difference in difference analysis across the gender divide. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 22(1), pp. 1–12. doi: <https://doi.org/10.4102/sajems.v22i1.2996>
- Komp, K., & Johansson, S. (2016). Population ageing in a lifecourse perspective: Developing

- a conceptual framework. *Ageing and Society*, 36(9), pp. 1937–1960. doi: <https://doi.org/10.1017/S0144686X15000756>
- Kowal, P., & Peachey, K. (2001). Indicators for the Minimum Data Set Project on Ageing : A Critical Review in sub-Saharan Africa. *Harare MDS Workshop Indicators*, 1–27. Retrieved from https://www.who.int/healthinfo/survey/ageing_mds_report_en_daressalaam.pdf
- Leubolt, B. (2014). Social policies and redistribution in Brazil. *The Global Labour University Working Paper*, 26, 1–338.
- Liu, X., & Cheung, E. (2013). The development of social assistance policy in China. *China Journal of Social Work*, (January 2015), pp. 37–41. doi: <https://doi.org/10.1080/17525098.2013.766409>
- Lohmann, H., & Zagel, H. (2016). Family policy in comparative perspective: The concepts and measurement of familization and defamilization. *Journal of European Social Policy*, 26(1), pp. 48–65. doi: <https://doi.org/10.1177/0958928715621712>
- Lombard, A., & Kruger, E. (2009). Older persons: The case of South Africa. *Ageing International*, 34(3), pp. 119–135. doi: <https://doi.org/10.1007/s12126-009-9044-5>
- MAHKOTA. (2017). Cash Transfers for the Elderly to Address Poverty and Stimulate Economic Growth: An Evaluation of Aceh Jaya's Old-Age Cash Transfer.
- Medeiros, M., & Diniz, D. (2015). Cash Benefits To Disabled Persons in Brazil: an Analysis of Bpc-Continuous Cash Benefit Programme, (1184), pp. 7 –31. Retrieved from www.cnotinfor.pt
- Menachem, S. (2015). Is social services policy based on constraints, ideology or politics? *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 209 (2015), pp. 490 – 496. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.277
- Menahem, G. (2007). The decommodified security ratio: A tool for assessing European social protection systems, 60.
- Mok, K. H., & Qian, J. (2019). A new welfare regime in the making? Paternalistic welfare pragmatism in China. *Journal of European Social Policy*, 29(1), pp. 100-114. doi: <https://doi.org/10.1177/0958928718767603>
- National Planning Commission. (2013). *National Development Plan 2030 Our Future-make it work*. The Presidency Republic of South Africa.
- Noyoo, N. (2017a). Reflecting on the Human Rights of Older Persons in South Africa. *Journal of Human Rights and Social Work*, 2(4), pp. 108–116. doi: <https://doi.org/10.1007/s41134-017-0039-y>
- Noyoo, N. (2017b). Social policy and welfare regimes typologies: Any relevance to South Africa? *Sozialpolitik Ch*, 2017(2), pp. 1–16. doi: <https://doi.org/10.18753/2297-8224-91>
- OECD. 2015. Integrating Social Services for Vulnerable Groups: Bridging Sectors for Better Service Delivery. OECD Publishing, Paris. Dikutip dari <http://dx.doi.org/10.1787/9789264233775-en>
- OHCHR. (2021). United Nations Principles for Older Persons Adopted by General Assembly resolution 46/91 of 16 December 1991. Retrieved from <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/olderpersons.pdf>
- Oliveri, M. L. (2016). Social Pensions and Poverty in Latin America. *InterAmerican Development Bank, Washington D.C.*, 43(78), pp. 121–157. Retrieved from file:///scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-18652016000100005&lang=pt
- Pension Watch. (2018). Social Pension Database, 2001(March). Retrieved from <http://www.pension-watch.net/social-pensions-database/social-pensions-database-/>
- Priebe, J., & Howell, F. (2014). Old-age poverty in Indonesia: Empirical evidence and policy options. *A Role for Social Pensions, TNP2K Working Paper 7 ...*, (March). Retrieved from http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Old Age Poverty April 1 Approved for Publication_EV.pdf
- Ralston, M., Schatz, E., Menken, J., Gómez-Olivé, F. X., & Tollman, S. (2015). Who benefits—or does not—from south africa's old age pension? Evidence from characteristics of rural pensioners and non-pensioners. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 13(1), pp. 1–14. doi: <https://doi.org/10.3390/ijerph13010085>
- Ralston, M., Schatz, E., Menken, J., Gómez-Olivé, F. X., & Tollman, S. (2019). Policy Shift: South Africa's Old Age Pensions' Influence on Perceived Quality of Life. *Journal of Aging*

- and Social Policy*, 31(2), pp. 138–154. doi: <https://doi.org/10.1080/08959420.2018.1542243>
- Ritchie, J. and Spencer, L. (1994) Qualitative Data Analysis for Applied Policy Research. In: Bryman, A. and Burgess, R., Eds., *Anal. Qual. Data*, Routledge, London, pp. 173-194. doi: https://doi.org/10.4324/9780203413081_chapter_9
- Roelen, K. (2014). Challenging Assumptions and Managing Expectations: Moving Towards Inclusive Social Protection in Southern Asia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 31(1), pp. 57–67. doi: <https://doi.org/10.1355/ae31-ld>
- Sander, M., Oxlund, B., Jespersen, A., Krasnik, A., Mortensen, E. L., Westendorp, R. G. J., & Rasmussen, L. J. (2015). The challenges of human population ageing. *Age and Ageing*, 44(2), 185–187. <https://doi.org/10.1093/ageing/afu189>
- Sapir, A. (2006). Globalization and the Reform of European Social Models. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 44(2), pp. 369-390. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2006.00627.x>
- Sandberg, J. (2016). Between poor relief and human capital investments–paradoxes in hybrid social assistance. *Social Policy & Administration*, 50(3), pp. 316-335. doi: <https://doi.org/10.1111/spol.12111>
- Schröder-Butterfill, E. (2004). Inter-generational family support provided by older people in Indonesia. *Ageing and Society*, 24(4), pp. 497–530. doi: <https://doi.org/10.1017/S0144686X0400234X>
- Shahid, A. (2014). Ageing with Dignity: Old-Age Pension Schemes from the Perspective of the Right to Social Security Under ICESCR. *Human Rights Review*, 15(4), pp. 455–471. doi: <https://doi.org/10.1007/s12142-014-0316-4>
- Shen, C., Johnson, J., Chi, Z., & Williamson, J. B. (2020). Does a universal non-contributory social pension make sense for rural China? *International Social Security Review*, 73(2), pp. 3–26. doi: <https://doi.org/10.1111/issr.12233>
- Social Protection Human Rights. (2021). Framework. Retrieved from <https://socialprotection-humanrights.org/framework/>
- Srivastava, A., & Thomson, S. B. (2009). Framework Analysis : Research Note. *Journal of Administration & Governance*, 4(2), pp. 72–79. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=2760705>
- Statistics South Africa. (2014). Census 2011: Profile of older persons in South Africa. Retrieved from <http://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-01-60/Report-03-01-602011.pdf>
- Sumini, Sukamdi, Pangaribowo, E. H., Keban, Y. T., & Darwin, M. (2020). Elderly Care: A Study on Community Care Services in Sleman, DIY, Indonesia. *Journal of Aging Research*, 2020. doi: <https://doi.org/10.1155/2020/3983290>
- The World Bank. (2019). Population ages 65 and above (% of total population). United Nations Population Division's World Population Prospects: 2019 Revision. Retrieved from <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=XM-XT-XN-XD>
- Tillin, L., & Duckett, J. (2017). The politics of social policy: welfare expansion in Brazil, China, India and South Africa in comparative perspective. *Commonwealth and Comparative Politics*, 55(3), 253–277. <https://doi.org/10.1080/14662043.2017.1327925>
- TNP2K, & SMERU Research Institute. (2020). *The Situation of the Elderly in Indonesia and Access to Social Protection Programs: Secondary Data Analysis*.
- UN/DESA. (2017). *World Population Prospects 2017 – Data Booklet (ST/ESA/SER.A/401)*. United Nations, Department of Economics and Social Affairs, Population Division.
- Vaitsman, J., & Lobato, L. de V. C. (2017). Continuous Cash Benefit (BCP) for disabled individuals : access barriers and intersectoral gaps. *Cien Saude Colet*, pp. 3527–3536. doi: <https://doi.org/10.1590/1413-812320172211.20042017>
- Van Dijk, H. G., & Mokgala, M. (2014). Does the administration of the Old Age Grant really benefit the rural poor?, 82–96.
- World Bank. (2017). Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia. World Bank, Jakarta. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28850> License: CC BY 3.0 IGO.”

- You, J., & Niño-Zarazúa, M. (2019). The Intergenerational Impact of China's New Rural Pension Scheme. *Population and Development Review*, 45(S1), 47-95. <https://doi.org/10.1111/padr.12248>
- Yuda, T.K. (2018). Welfare Regime Transformation in Indonesia : A Citizenship Debate. *MASYARAKAT Jurnal Sosiologi*, 23(2), pp. 143-165. doi: <https://doi.org/10.7454/M>
- Zheng, H., & Zhong, T. (2016). The impacts of social pension on rural household expenditure: evidence from China. *Journal of Economic Policy Reform*, 19(3), pp. 221-237. doi: <https://doi.org/10.1080/17487870.2015.1041524>